

PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN RETRIBUSI OBJEK WISATA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Fahrul Imam Kasimpa Wali¹

Fahrulimam.k@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Herlina Pusparini²

h.pusparini@unram.ac.id

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Indria Puspitasari Lenap³

indrialenap@unram.ac.id

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem pengendalian internal dalam pengelolaan retribusi objek wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah serta menilai kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptis dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini, Kasubag Keuangan, Kabid Pengembangan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengendalian internal pengelolaan retribusi wisata telah mencakup beberapa aspek sistem pengendalian internal pemerintah, seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurang optimalnya pemantauan internal, dan keterbatasan sumber daya teknologi informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal telah diterapkan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam penguatan struktur pengendalian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan retribusi objek wisata.

Kata Kunci: pengendalian internal, pengelolaan, retribusi wisata, dinas pariwisata

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the internal control system in the management of tourist attraction levies in the Tourism Office of Central Lombok Regency and to assess its compliance with Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System. The research method used is descriptive with a qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The informants in this study were the Head of Finance, Head of Development, and Assistant Treasurer of Revenue. The results of the study indicate that the implementation of internal control of tourism retribution management has covered several aspects of the government's internal control system, such as the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. However, there are still several obstacles, such as less than optimal internal monitoring, and limited information technology resources. This study concludes that although the internal control system has been implemented, it is not fully in accordance with PP No. 60 of 2008. Therefore, improvements are needed in strengthening the control structure, increasing human resource capacity, and utilizing technology to improve accountability and transparency in the management of tourist attraction levies.

Keywords: internal control, management, tourism levies, tourism office

PENDAHULUAN

Pengendalian internal merupakan implementasi dari proses untuk memberikan jaminan yang memenuhi beberapa komponen dari pengendalian internal. Jaminan yang dimaksud adalah menjaga aset, menjaga kedetailan dan keakuratan laporan aset perusahaan, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyiapkan laporan keuangan sesuai ketentuan, mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong ketaatan dalam hal manajerial dan memenuhi persyaratan regulasi yang ada (Prifanda, 2020). Selain itu, pengendalian internal ditujukan agar semua aturan yang ditetapkan dilaksanakan oleh semua pegawai organisasi (Daos & Angi, 2019). Pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 dibagi menjadi lima unsur yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Oleh karena itu, setiap organisasi baik di pemerintahan maupun swasta diperlukan menjalankan pengendalian internal agar tujuan yang direncanakan terpenuhi dan mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien (Aditoni, 2020).

Pengelolaan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dalam sektor retribusi wisata. Dengan menggunakan fungsi manajemen yang meliputi indikator, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan (Hidayat & Rusnain, 2016). Pengelolaan adalah ditunjukan kepada pencapaian tujuan kelompok atau lembaga dengan kata lain pengelolaan harus bisa bekerja dengan orang-orang atau kelompok agar bisa tercapai tujuan yang direncanakan (Lumenta et al., 2019). Retribusi wisata adalah retribusi yang dikenakan kepada pengunjung dan pedagang yang ada di dalamnya (Waruwu, 2020).

Retribusi pariwisata merupakan pungutan yang dikenakan pada pengunjung yang datang ke tempat destinasi (Ani, 2020). Retribusi objek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun implementasi di Lombok Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib retribusi, kurangnya sosialisasi, dan pengawasan yang belum maksimal. Optimalisasi retribusi wisata dapat mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata dan peningkatan layanan publik yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Konsistensi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal dalam mengelola retribusi memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan mengurangi pelanggaran terhadap pengelolaan retribusi. Meskipun SPIP yang dijalankan belum sepenuhnya dilakukan, akan tetapi dampak dari penerapan sebagian SPIP ini bisa menjalankan tugas dengan efektif dan efisien. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutandi et al., (2020), Sulistiyantoro, (2020), Hasmawati, (2022), dan Mochdar et al., (2023), yang menemukan bahwa implementasi sistem pengendalian internal dalam mengelola retribusi memiliki pengaruh positif, dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki tata kelola organisasi. Walaupun penelitian terdahulu juga belum semua menjalankan bagian yang dalam SPIP, baik dari penelitian ini maupun penelitian terdahulu yang sama dalam proses penyempurnaan. Inkonsistensi dari hasil penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laka, (2019), Wahyuningtiyas, (2019), Waruwu, (2020), dan Tumija, (2022), yang menyatakan bahwa pengelolaan retribusi dengan cara mengimplementasi SPIP tidak selalu berdampak positif. Bahwa penelitian terdahulu bahwa beberapa pengaruh yang menyebabkan baik dari segi penerimaan retribusi maupun dari segi sumber daya manusia, diantaranya akses transportasi yang buruk, promosi TI yang tidak memadai, pengelolaan data pajak yang tidak efektif, dan ketidakpuasan pedagang terhadap fasilitas

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan retribusi wisata, dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Tengah.

TINJAUAN LITERATUR

Tujuan Pengendalian Internal

Sudiarto et al (2021) menyatakan pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keadilan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian dibutuhkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dari rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Suatu usaha dapat berlangsung secara efisien dan tetap terkendali sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan apabila pengendalian internal dalam perusahaan tersebut dapat dijalankan secara efektif.

Sistem Pengendalian Internal menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal) adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan.

Menurut PP nomor 60 tahun 2008 menyatakan tujuan sistem pengendalian internal adalah:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien, Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian harus dirancang agar tujuan yang akan dicapai berjalan efektif dan efisien.
2. Laporan keuangan dapat diandalkan, tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi pemerintah untuk pengambilan kesimpulan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan.
3. Pengamanan aset negara, aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Setiap tindakan dan transaksi merupakan perbuatan hukum sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat.

Unsur-unsur Pengendalian Internal

Dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 60, tahun 2008), menyatakan ada lima unsur dalam Sistem Pengendalian Internal pemerintah diantaranya:

1. Lingkungan pengendalian, adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal, di mana telah terbangun Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak.
2. Penilaian resiko, diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun tingkat kegiatan
3. Kegiatan pengendalian, adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan prosedur untuk memastikan tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif.

4. Informasi dan komunikasi, pemerintah harus memilih informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa internal dan eksternal
5. Pemantauan, dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Retribusi

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor 1 tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha pasal 1 huruf f. Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1, 2018, jenis retribusi retribusi usaha terdiri dari:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
3. Retribusi tempat pelelangan
4. Retribusi tempat khusus parkir
5. Retribusi tempat penginapa/persinggahan/villa
6. Retribusi rumah potong hewan
7. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
8. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Struktur dan Besar Tarif Retribusi

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1, 2018, struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yaitu:

1. Taman rekreasi
 - a. Dewasa Rp. 7.000,-/Orang
 - b. Anak-anak Rp. 5.000,-/Orang
2. Pemandian alam
 - a. Wisatawan mancanegara Rp. 20.000,-/Orang
 - b. Wisatawan nusantara Rp. 5.000,-/Orang
3. Kolam memancing Rp. 10.000,-/Orang

Gelanggang olahraga (koni Praya, koni Puyung) Rp. 10.000,-/Orang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis, faktual terhadap fenomena yang diteliti berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan retribusi objek wisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Pariwisata dan Kabupaten Lombok Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah

Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan, dan mempromosikan sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten di Pulau Lombok yang kaya akan potensi alam, budaya, dan tradisi lokal. Seluruh kawasan wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.

Pengelolaan

Implementasi sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan retribusi wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan dinamika yang kompleks antara teori pengendalian internal dan praktik di lapangan. Temuan penelitian ini mengungkap beberapa aspek tentang tata kelola pemerintahan dan manajemen pariwisata.

1. Lingkungan pengendalian yang tercipta di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah mencerminkan upaya sistematis dalam menciptakan budaya organisasi yang terintegritas.
2. Manajemen resiko, terkait dengan sistem manual penjualan tiket.

Retribusi Wisata

Retribusi wisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah mencakup, sistem penarikan retribusi, terkait dengan mekanisme penarikan menggunakan metode, pembayaran tunai, dan sistem pencatatan masih menggunakan sistem manual.

Kinerja Penerimaan Retribusi

Pendapatan retribusi daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 975.000.000 dan Rp. 1.102.180.000. Sedangkan pendapatan retribusi daerah LRA untuk tahun 2024 senilai Rp. 975.000.000 perbedaan tahun 2023 Rp. 1.102.180.000. Perubahan nilai retribusi daerah disebabkan karena, pada tahun 2024 Bapenda sudah tidak lagi menjadi pengelola pemungutan retribusi.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah

Sistem pengendalian internal pemerintah atas pengelolaan retribusi wisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah meliputi :

Bagian-bagian yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah terkait pengelolaan retribusi wisata

1. Bagian lingkungan pengendalian terdiri dari berbagai penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi, pengawasan internal, dan hubungan kerja dengan instansi terkait. Bagian ini berfungsi untuk menciptakan tempat kerja yang kondusif dan menjadikan pekerjaan yang efektif dan efisien setiap menjalankan pengelolaan sumber pendapatan yang diterima.
2. Bagian penilaian resiko, bagian ini untuk mengamati resiko yang terjadi di lapangan dalam mengelola retribusi wisata yang diterima untuk diatasi dengan melakukan evaluasi yang sesuai dengan temuan di lapangan.
3. Bagian kegiatan pengendalian, bagian ini disebut dengan bendahara satuan kerja yang bertanggung jawab pembukuan keuangan, menyimpan dan mengeluarkan anggaran dengan mengeluarkan surat perintah penggunaan untuk pengelolaan dan pemeliharaan tempat wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Bagian informasi dan komunikasi, bagian ini terdiri dari sarana komunikasi seperti, pedoman kebijakan, surat edaran, dan situs internet guna untuk menyampaikan informasi internal dan eksternal dari setiap kegiatan atau kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah
5. Bagian Pemantauan, bagian ini disebut dengan pengawas lapangan. Bagian ini dilakukan untuk mengurangi kegiatan kecurangan di lapangan yang mempengaruhi penurunan pendapatan asli daerah dan melakukan evaluasi terkait kejadian yang ditemukan untuk meminimalisir kejadian yang sama.

KESIMPULAN

Implementasian PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dengan melihat unsur-unsur SPIP yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Walaupun Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dalam menjalankan sistem pengendalian internal pemerintah masih melakukan uji coba untuk menjalankannya, sebelum dikeluarkannya SK untuk digunakan secara keseluruhan unsur-unsur yang ada di dalam sistem pengendalian internal pemerintah. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, sebagai instansi dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisata yang ada di Lombok Tengah untuk kenyamanan wisatawan yang datang, sehingga apabila dikelola dengan baik pendapatan asli daerah akan meningkat.

Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah agar dapat meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah SPIP yang lebih berkomitmen tinggi terhadap unsur-unsur dalam SPIP, sehingga kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dapat dikurangi sampai batas minimum. Penelitian ini hanya melihat penerapan SPIP pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pernyataan dari informan kemudian peneliti mengembangkan dan mencocokkan pernyataan tersebut dengan kriteria unsur-unsur dalam SPIP sesuai dengan isi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP sehingga memungkinkan penelitian ini belum menggambarkan hasil yang sebenarnya mengenai implementasi unsur SPIP pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Pariwisata. Untuk peneliti selanjutnya agar semua unsur-unsur SPIP perlu dikaji lebih mendalam, dengan melihat kontribusi SPIP yang terfokus pada kualitas laporan keuangan atau kinerja pegawai/ karyawan suatu entitas, dengan menggunakan kuesioner sebagai metode penelitian untuk mendapatkan gambaran akurat mengenai tingkat implementasi SPIP, semua item dalam daftar uji pengendalian internal pada PP Nomor 60 Tahun 2008 turut disertakan dalam kuesioner dengan menggunakan karyawan sebagai subjek penelitian akan lebih memaksimalkan penelitian. Informan dalam penelitian selanjutnya lebih baik jika diperbanyak dan menentukan sesuai dengan bidangnya untuk menjamin keakuratan informasi.

REFERENSI

- Aditoni, A. (2020). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Kas Pada Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku (Pamtm) Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 85–105. <https://doi.org/10.35906/ja001.v5i1.532>
- Ani. (2020). Pengaruh Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Luwu Utara. *Universitas Muhammadiyah Palopo*, 1–16.
- Daos, M., & Angi, Y. F. (2019). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dan Perlakuan Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada Ud. Angkasa Raya Kupang. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1298>
- Hasmawati, H. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Optimalisasi Penerimaan Retribusi *Jurnal Administrasi Terapan*, 1(1), 124–134. <https://www.ejournal-polnam.ac.id/index.php/JAT/article/view/1541%0Ahttps://www.ejournal-polnam.ac.id/index.php/JAT/article/view/1541/723>
- Hidayat, N., & Rusnain, A. M. (2016). Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Katingan. *Pencerah Publik*, 3(1), 12–16.

<https://doi.org/10.33084/pencerah.v3i1.794>

- Laka, Yohanes, H., & Sasmito, C. (2019). Manajemen Strategi Kebijakan Publik Sektor Pariwisata Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Jawa Timur pada Era Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 55(4), 524–530. <https://doi.org/10.1134/S0514749219040037>
- Lumenta, C. N., Mantiri², M. S., & Monintja, D. K. (2019). Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pulisan Di Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–10.
- Mochdar, K. S., Marselina, A., & Ismail, N. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Angkutan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ende. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 4(1), 83–92. <https://doi.org/10.37478/jria.v4i1.3906>
- Prifanda, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Persediaan Pada Perumda Taman Satwa Taru Jurug Surakarta. *JURNAL WIDYA GANECWARA*, 10(4), 1–14. <https://doi.org/10.36728/jwg.v10i4.1218>
- Sudiarto, E., Kurniawan, D., & Djuharni, D. (2021). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Obat-Obatan Pada Uptd Puskesmas Puncu. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 112–118. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1275>
- Sulistiyantoro, D., & Nusa, G. H. (2020). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Guna Optimalkan Pengelolaan Retribusi Parkir. *Accounting Global Journal*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.24176/agj.v4i1.4295>
- Sutandi, S., Masnoni, Nelly, Irsan, & Sari, L. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. *EKOBIS : Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 73–81.
- Tumija, & Bagus Jadog. (2022). Pengelolaan Objek Wisata Pantai Oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9, 23–39.
- Wahyuningtiyas, D. M. (2019). Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Sektor Pariwisata Di Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2016 – 2017. *Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8(1), 711–719.
- Waruwu. (n.d.). *Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Objek Wisata Oeluan Di Kabupaten Timor Tengah Utara*. 175–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/jan.v4il.2630>